

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bahwa kemerdekaan Republik Indonesia adalah alat untuk mencapai tujuan dalam mewujudkan cita-cita bangsa, sedangkan tujuan dan cita-cita Bangsa Indonesia adalah masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk mencapai tujuan itu diperlukan pembangunan di segala bidang. Pembangunan dapat terlaksana dengan adanya usaha-usaha kegiatan yang dilakukan oleh aparat pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat.

Pembangunan tanpa landasan, tujuan dan arah yang jelas tidak akan memperoleh hasil yang baik. Oleh karena itu di samping kemampuan aparat pemerintah sebagai perencana, pelaksana dan pengawas dari pembangunan itu diperlukan juga adanya partisipasi aktif dari masyarakat guna mensukseskan pembangunan itu.

Sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pembangunan telah dilaksanakan, namun mengalami hambatan-hambatan yang sangat fatal akibat gejolak-gejolak politik di tanah air.

Berdasarkan Garis-Garis Besar haluan Negara (GBHN) Tahun 1993 maka pembangunan itu dilaksanakan secara bertahap. GBHN adalah cerminan pernyataan kehendak rakyat untuk memberikan arah bagi pembangunan Nasional. Kegiatan pembangunan dilakukan melalui pembangunan sektoral dan pembangunan daerah serta dilaksanakan secara terpadu dan saling isi mengisi.

Pada hakekatnya fungsi dan peranan Pemerintah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan terutama dalam rangka membangun masyarakat, bagi setiap negara tidak selalu sama. Hal ini tergantung pada beberapa hal pokok antara lain :

" Pertama adalah falsafah hidup kemasyarakatan dan kedua adalah falsafah politik masyarakat tersebut. Fungsi dan peranan pemerintah seringkali tergantung tingkat kemajuan suatu negara terutama di bidang ekonomi materiil ".¹

Seperti halnya dalam negara-negara yang sedang berkembang atau negara dunia ketiga, dimana pada umumnya kondisi masyarakatnya masih bersifat tradisional ataupun dengan lain perkataan masyarakatnya sedang mengalami proses peralihan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern, pada umumnya fungsi dan peranan Pemerintah sangat menonjol.

Hal ini dimungkinkan oleh karena keberadaan masyarakatnya ataupun oleh ciri-ciri yang terdapat di dalam masyarakatnya.

Pada umumnya negara-negara dunia ketiga belum mempunyai ekonomi yang stabil dan penduduknyapun dapat dikatakan penghasilan per-kapitanya masih rendah. Biasanya perekonomiannya pun masih tradisional. Pemikiran-pemikiran dan gagasan-gagasan baru belum dapat menyusup sampai ke desa-desa. Umpamanya salah satu di antaranya adalah tentang kenegaraan, sehingga sebahagian besar masyarakatnya belum mempunyai kesadaran nasional, masih sering terikat pada golongan-golongan, seperti suku atau yang bersifat kedaerahan.

¹ Bintoro Tjokroamidjojo, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta, 1974, hal. 17.